KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Aziz Ditolak, Fadli Zon Jabat Plt Ketua DPR
Tanggal : Selasa, 12 Desember 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Aziz Ditolak, Fadli Zon Jabat Plt Ketua DPR

JAKARTA – Setya Novanto akhirnya resmi mundur dari jabatan ketua DPR. Namun, internal Partai Golkar justru bergejolak lantaran keputusan Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin untuk menggantikannya ditolak mayoritas anggota fraksi.

Penolakan terhadap Aziz ini dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 50 dari 91 anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) menjelang rapat paripurna DPR kemarin. Sikap anggota fraksi yang terpecah ini membuat Badan Musyawarah DPR dan pimpinan DPR memutuskan menunda pelantikan Aziz sebagai ketua DPR yang baru.

Bamus menolak pelantikan Aziz karena ada dua surat berbeda yang diterima dari FPG. Surat pertama ditandatangani Ketua FPG Robert J Kardinal yang isinya menunjuk Aziz sebagai ketua DPR. Namun, ada juga surat yang ditandatangani oleh Sekretaris FPG Agus Gumiwang Kartasasmita yang isinya membatalkan surat penunjukan Aziz.

Rapat tertutup Bamus yang berlangsung sekitar empat jam menyarankan agar persoalan ini diselesaikan di tataran internal Golkar terlebih dulu. Namun, Bamus menyatakan tetap menerima surat pengunduran diri Novanto.

Untuk mengisi kekosongan posisi ketua DPR setelah mundurnya Novanto, pimpinan DPR kemarin memutuskan menunjuk Fadli Zon sebagai pelaksana tugas (plt).

Fadli Zon menjelaskan, ketua DPR definitif akan diajukan Partai Golkar melalui fraksi pada waktu yang ditetapkan. Kemungkinannya pada masa sidang mendatang yang akan dimulai pada 9 Januari 2018.

Penolakan atas penunjukan Aziz dilakukan karena diduga ada kesalahan prosedur yang dilakukan Novanto selaku ketua umum. Seharusnya, sebelum menyurati FPG untuk meminta Aziz sebagai ketua DPR, terlebih dulu dilakukan rapat pleno oleh DPP Golkar.

"Sebetulnya ini bentuk kekecewaan dan keprihatinan. Ini persoalan bukan pada Pak Azizn-ya, tapi mekanisme yang diambil di dalam proses penunjukan ketua DPR tersebut," kata anggota FPG yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzili di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Ace menjelaskan, ada sejumlah kesalahan prosedur yang dilakukan dalam penunjukan Aziz. *Pertama* , DPP Golkar sebelumnya sudah menyepakati dalam rapat pleno pada 21 November 2017 bahwa penunjukan ketua DPR akan menunggu hasil praperadilan Setya Novanto yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

Kedua, penunjukan ketua DPR biasanya dibahas di dalam rapat pleno karena dalam pleno dibahas sejumlah hal strategis, termasuk di antaranya penunjukan ketua DPR. *Ketiga* , ada usulan dari hampir semua DPD I Partai Golkar se-Indonesia yang meminta diadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dalam waktu dekat. Munaslub ini bertujuan memilih ketua umum Partai Golkar yang baru pengganti Novanto. Ace menegaskan, 50 anggota FPG meminta agar penunjukan ketua DPR harus sesuai prosedur yang ada di AD/ART Partai Golkar.

> ***"Kita kan nggak mau politik menjadi gaduh. Bagi saya nggak ada masalah, kita lihat mekanisme, prosedur."***
>
> **AZIZ SYAMSUDDIN**
> Anggota Fraksi Partai Golkar

Dua dari 50 anggota FPG yang menandatangani penolakan Aziz adalah dua legislator yang disebut-sebut bersaing menjadi ketua DPR, yakni Agus Gumiwang dan Bambang Soesatyo.

Kendati menggunakan alasan pelanggaran prosedural, penolakan anggota fraksi terhadap pelantikan Aziz ini diduga berkaitan dengan munculnya dua kubu di Partai Golkar, yakni antara pendukung Novanto dan kubu properubahan. Apalagi, penolakan atas Aziz didominasi oleh kubu pendukung munaslub.

Diketahui, atas dorongan mayoritas DPD I, munaslub Golkar direncanakan digelar dalam waktu dekat. Munaslub disebut-sebut akan memilih Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai ketua umum. Kubu properubahan ini juga sudah mengapungkan nama calon ketua DPR yang akan menggantikan Novanto, yakni Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang.

Ketua FPG Robert J Kardinal menyesalkan penolakan anggota fraksi terhadap Aziz. Apalagi, baik kader maupun anggota fraksi dinilai sudah mengetahui surat Novanto ke FPG yang menunjuk Aziz. Terkait alasan dipilihnya Aziz oleh Novanto, Robert mengaku tidak tahu karena dirinya tidak pernah bertemu dengan Novanto dan hanya mematuhi keputusan pimpinan partai. "Kalau saya *sih* patuh pada aturan saja tegak lurus. Kita kalau *nggak* tegak lurus sama pimpinan dan ketua umum sama sekjen, bagaimana kita mau berpartai," ujarnya kemarin.

Aziz Syamsuddin memaklumi penundaan pelantikan dirinya sebagai ketua DPR yang bertujuan agar DPR dan Golkar tidak gaduh, meskipun ketua Badan Anggaran DPR tersebut bersikukuh mekanisme penunjukan dirinya sebagai ketua DPR telah sesuai prosedur.

"Kita *kan* nggak mau politik menjadi gaduh. Bagi saya *nggak* ada masalah, kita lihat mekanisme, prosedur," ujarnya.

Menurut dia, penunjukan dirinya sebagai ketua DPR merupakan respons baik Novanto atas pemintaan Mahkamah Kehormatan Dewan dan masyarakat yang meminta Novanto mundur sebagai ketua DPR.

"*Nah* , beliau (Novanto) sudah mundur jadi ketua DPR, kemudian surat sudah mulai dimasukkan per tanggal 8 Desember, kemudian juga beliau sudah menunjuk dalam kapasitasnya sebagai ketua umum," imbuhnya.

Walaupun merasa mekanisme penunjukannya sesuai prosedur, anggota Komisi III DPR ini merasa kegaduhan di internal FPG sehingga memaklumi pelantikannya ditunda.

"Makanya agar tidak meluas disepakati dalam Bamus untuk menunda untuk membacakan surat tersebut di rapat paripurna," ucap Azis.

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad menyayangkan penunjukkan Aziz . Menurut Fadel, lebih baik digelar munaslub terlebih dahulu untuk memilih ketua umum daripada menunjuk Ketua DPR.

"Ya saya pikir ini kan menyangkut kepentingan Golongan Karya. Golongan Karya ini *kan* partai besar. Partai ada aturan-aturannya. Jadi kami para senior sudah menganjurkan kalau boleh

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id



SINDOnews/SUTIKNO

Ketua Banggar DPR Aziz Syamsuddin (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (dua kiri) berjalan seusai mengikuti rapat Bamus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Aziz Syamsuddin, yang ditunjuk Setya Novanto menggantikan dirinya menjadi ketua DPR, mendapat penolakan lebih dari 50 persen anggota DPR Fraksi Golkar.

DRAMA POLITIK AKHIR TAHUN

Peralihan kursi ketua DPR dari Setya Novanto ke Aziz Syamsuddin tidak berjalan mulus. Bamus DPR menunda pelantikan Aziz karena ditolak mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar. Polemik ketua DPR ini kembali mengulang drama yang kerap terjadi di DPR menjelang akhir tahun.

16 Desember 2015
Setya Novanto mundur sebagai ketua DPR setelah kasus "Papa Minta Saham" disidangkan di MKD.

11 Januari 2016
Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin dilantik sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto, sedangkan Novanto menjadi ketua fraksi.

30 November 2016
Sidang paripurna DPR memberhentikan Ade Komarudin sebagai ketua DPR dan digantikan oleh Setya Novanto yang nama baiknya dipulihkan oleh MKD dalam kasus "Papa Minta Saham".

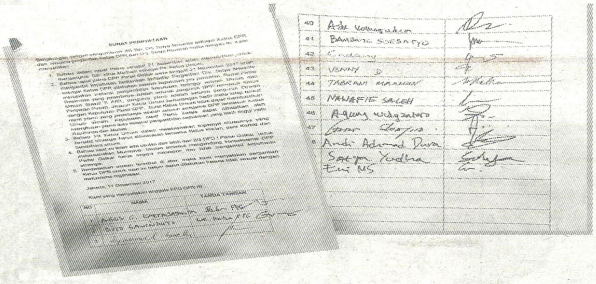
11 Desember 2017
Setya Novanto yang jadi tahanan KPK resmi mundur sebagai ketua DPR, tetapi Badan Musyawarah DPR batal melantik Aziz Syamsuddin karena ada perbedaan pendapat di Fraksi Partai Golkar.



KORAN SINDO/WIN CAHYONO

Beringin Terbelah Dua

Partai Golkar terbelah, yakni antara kubu pendukung Setya Novanto yang terdiri atas sejumlah elite DPP Golkar dan kubu pro-perubahan yang didukung sejumlah senior partai dan pimpinan DPD I.



	Kubu Pro-Perubahan	*Kubu Setya Novanto*
Isu Munaslub	• Mendesak munaslub digelar pada 15 Desember 2017 untuk memilih ketua umum baru • Mengusung Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum	• Munaslub baru digelar setelah praperadilan Novanto selesai sebagaimana hasil pleno DPP Golkar • Mendorong loyalis Setya Novanto maju sebagai calon ketua umum, salah satunya Idrus Marham
Pergantian Ketua DPR	• Meminta penggantian ketua DPR dilakukan setelah ketua umum baru terpilih lewat munaslub • Mendukung Bambang Soesatyo atau Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai calon ketua DPR	• Kewenangan pergantian ketua DPR masih jadi kewenangan Setya Novanto selaku ketua umum Golkar • Menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto
Dukungan ke Pemerintah	• Menegaskan Golkar tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo	• Menegaskan Golkar tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo

dilakukan munaslub dulu" ujar Fadel di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, kemarin.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menilai bila pergantian Ketua DPR dilakukan sebelum Munaslub terlihat seperti dipaksakan. Dia mengkhawatirkan, akan terjadi pergantian Ketua DPR kembali bila tak dilakukan munaslub terlebih dahulu.

kiswondari/ okezone